

Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan sosial Ekonomi Masyarakat dan Kemandirian Desa Di Kabupaten Pandeglang

Nur Hasanah Suryadi^{1,*} dan Gunawan Undang¹⁾

¹⁾Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

*Corresponding author
E-mail: nhurhasanah123@gmail.com

ABSTRAK

Program Inovasi Desa (PID) hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas. Namun, program yang dibuat oleh Pemerintah masih belum bisa berjalan sepenuhnya oleh Dinas PMD Kabupaten Pandeglang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan sosial Ekonomi Masyarakat dan Kemandirian Desa Di Kabupaten Pandeglang. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, inser observasi, dan Study literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan kemandirian Desa di Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat, sudah berjalan secara tidak namun belum efektif. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pandeglang dalam pencapaian tujuan, proses kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Inovasi Desa, serta tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu adanya pencapaian tujuan PID, perkembangan kewirausahaan, dan Adanya Prasarana dan Sasaran yang dibutuhkan dalam Infrastruktur Desa. Kesimpulannya terlihat dari program yang dibuat oleh Pemerintah masih belum bisa berjalan sepenuhnya oleh Dinas PMD Kabupaten Pandeglang. Dan masih ada beberapa kendala terhadap Program Inovasi Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa, Untuk mengetahui beberapa kendala tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah 2. potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terrealisasikan dengan baik 3. Keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Kata kunci: Program Inovasi Desa; Kesejahteraan Sosial Ekonomi; Kemandirian Desa

ABSTRACT

The Village Innovation Program (PID) is present as one of the government's efforts to improve community welfare and through increasing village capacity in developing quality village development plans and implementation. However, the program made by the Government is still not fully operational by the PMD Office of Pandeglang Regency, the purpose of this study is to determine the Effectiveness of the Village Innovation Program in Realizing the Socio-Economic Welfare of the Community and Village Independence in Pandeglang Regency. The method used is a qualitative method by means of in-depth interviews, insert observations, and study literature. The results of the study indicate that the implementation of the Village Innovation Program in Realizing Village Independence at the Village Community Empowerment Service of Langkat Regency, has not been running but has not been effective. The actions taken by the Pandeglang Regency Village Community Empowerment Service in achieving goals, the process of activities carried out by the Village Innovation Sector, as well as the stages that have been carried out well by the Village Community Empowerment Service, namely the achievement of PID goals, entrepreneurial development, and The existence of the necessary infrastructure and targets in village infrastructure. The conclusion can be seen from the programs made by the Government that have not been fully implemented by the Pandeglang Regency PMD Service. And there are still some obstacles to the Village Innovation Program in Realizing Village Independence, To find out some of these obstacles, namely as follows: 1. The quality of community human resources is relatively low 2. The natural potential in rural areas has not been fully realized properly 3. Limitations in management and the lack of resources to push the available potential.

Keywords: Village Innovation Program; Socio-Economic Welfare; Village Independence.

PENDAHULUAN

Pembentukan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan penegasan Pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan desa, Indonesia merubah sudut pandangnya akan Desa Karena berubahnya paradigma dunia yang memberitakan desa sebagai bagian penting dalam globalisasi.

Desa Merupakan kumpulan tempat tinggal di wilayah terbatas. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewarganegaraan lokal skala desa, meningkatkan kapasitas finansial melalui Program Dana Desa (PDD) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sehingga desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengantar dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Nurcholis upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Pedesaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia saja, melainkan harus adapemecahan masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terrealisasikan dengan baik. Hal tersebut di karenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Oleh karena itu, maka dibentuklah Program Inovasi Desa (PID) hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas. Menurut keputusan Menti Desa No.38 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa menyebutkan bahwa Program Inovasi Desa sebagai panduan bagi para pihak dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, maupun Pemantauan Program Inovasi Desa, yang pendanaanya berasal dari International Bank for Recontruction and development (Word Bank) atau Bank dunia. Program Inovasi Desa (PID) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarkat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini di harapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarkat dan Kemandirian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

Namun, pada kenyataannya Program Inovasi Desa di Kabupaten Pandeglang belum Efektif di dalam mewujudkan Kemandirian Desa. Hal tersebut karena kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terrealisasikan dengan baik, dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Dapat dilihat bahwa Program Inovasi Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa sangat dibutuhkan agar tercapainya Desa yang mandiri yakni (1) pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa bersama), serta produk unggulan desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades); (2) peningkatan kulitas sumber daya manusia (SDM); (3) pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan; dan (4)memberi dukungan penguatan manajemen P3MD dan pengembangan sistem informasi Pembangunan Desa.

Dengan demikian Program Inovasi Desa dapat direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Langkat agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Keputusan Menteri No. 83 Tahun 2017.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif, menurut Kriyantono menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan secara mendalam. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini termasuk deskripsi kualitatif dengan cara wawancara secara mendalam, observasi dan Study Literatur dan di analisis menjadi sebuah Informasi yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Teori

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan: prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Vernor C. Finch dan Glenn T. Trewartha adalah sekumpulan tempat tinggal di wilayah terbatas.

Program Inovasi Desa (PID) dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang terfokus dalam 3 sasaran program diantaranya pengembangan wirausaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengadaaan infrastruktur desa.

Program Inovasi Desa (PID) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini di harapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan Kemandirian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera, yaitu yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-baiknya.

Desa mandiri saat ini menjadi isu menarik yang banyak didiskusikan orang. Dalam naskah UU Desa, secara eksplisit tidak dijelaskan konsep maupun ukuran desa mandiri. Karena tidak ada definisi baku, banyak orang maupun institusi selanjutnya menafsirkan makna kemandirian desa berdasarkan argumentasi masing-masing.

Menurut Hastowiyono, secara etimologis, ke(mandiri)an berbeda dengan ke(sendiri)an, berbeda pula dengan ke(diri)an. Ke(sendiri)an berarti mengurus dirinya sendiri tanpa dukungan pemerintah, dan pemerintah membiarkan desa bekerja sendiri dengan kekuatan lokal, misalnya dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Ke(diri)an sering disebut dengan autarchy atau sikap ego desa yang lebih banyak berorientasi ke dalam (inward looking), yang tidak mau berinteraksi dengan dunia luar. Sedangkan kemandirian dapat diartikan sebagai kapasitas (kemampuan) untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan optimalisasi potensi dirinya, tanpa menggantungkan pada pihak lain.

Kemandirian dapat juga dimaknai adanya emansipasi (inisiatif/prakarsa dan kemauan/motivasi dari dalam diri) untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang sejahtera secara berkelanjutan. Dengan demikian, kemandirian desa berpusat pada kapasitas dan emansipasi lokal, yakni kemampuan, prakarsa dan gerakan desa secara kolektif dalam mengembangkan potensi-aset yang dimiliki. Kalaupun ada keterlibatan dari pihak luar, keterlibatannya lebih bersifat memperkuat atau memberi dukungan energi untuk mempercepat pencapaian tujuan. Konsep kemandirian desa (otonomi desa) juga menunjuk adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. menurut Sunarti (2012),

Oleh sebab itu Pengaruh kemandirian desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya kemandirian desa itu, perangkat desa dapat membentuk unit-unit ekonomi atau melakukan pembangunan di segala bidang sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja di desa, dengan demikian maka masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Menurut Nurcholih upaya peningkatan kesejahteraan sosial Ekonomi Masyarakat dan kemandirian Pedesaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia saja, melainkan harus ada pemecahan masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terrealisasikan dengan baik. Hal tersebut di karenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Review Hasil Penelitian Sebelumnya

Siti, A. M. skripsi "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (Pid) Di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal". Hasil dari penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Magersari melalui beberapa tahapan yaitu; Tahap penyadaran, Tahap Pengkapasitasan, dan Tahap Pendayaan

Penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi, pada pembahasannya di atas lebih menekankan pada bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat dalam Program Inovasi Desa (PID), sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana inovasi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat

kewirausahaan.

Astuti, L.I jurnal "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan" penelitian ini dilatar belakangi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan, Salah satu tugas dan kewajiban negara yaitu untuk mensejahterakan warga negaranya yang di wujudkan melalui pembangunan, Pembangunan yang di terapkan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki melalui pemberdayaan

Penelitian di atas memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu pemberdayaan masyarakat, Namun penelitian diatas lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan petani berkelanjutan, Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Program inovasi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat kewirausahaan.

Adanya Pencapaian Tujuan Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Kemandirian Desa

Program Inovasi Desa ini adalah salah satu cara untuk menjembatani kebutuhan Pemerintah Desa akan solusi bagi penyelesaian masalah menuju Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Kemandirian Desa serta tindakan atau alternatif kegiatan Pembangunan Desa yang lebih efektif dan inovatif.

Dengan adanya Program Inovasi Desa ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan desa yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia saja, melainkan harus ada pemecahan masalah kemiskinan. Desa melalui pemanfaatan Dana Desa. dan juga dapat meningkatkan kualitas Penggunaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Inovatif dan peka terhadap kebutuhan Masyarakat Desa dan dapat Membangun Kapasitas Desa yang Mandiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka jelaslah bahwa maksud dan tujuan Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa yaitu Dengan adanya Dana Desa lebih berkualitas lagi, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa setempat. Hal ini relevan dengan hasil wawancara, yang menyatakan bahwa adanya Pencapaian tujuan Program Inovasi Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa yaitu untuk meningkatkan penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadapkebutuhan masyarakat Desa. dan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomian Desa serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan Kemandirian Desa. mengembangka pemikiran masyarakat Desa. Serta mengembangka kewirausahaan dan infrastruktur.

Namun, dikarenakan Kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah tujuan Program Inovasi desa tidak terrealisasikan dikarenakan tidak adanya pemahaman masyarakat betapa pentingnya berinovasi. Adapun upayanya yaitu Memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya berinovasi harus menanamkan budaya kerja yang mendukung sebagai terciptanya kreativitas dan inovasi baru. Salah satu cara adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia agar selalu bersikap kritis dan menindaklanjuti sifat kritisnya dengan tindakan yang nyata untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian sikap tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan proses aktualisasi diri

Adanya Pengembangan Kewirausahaan

Perekonomian Pedesaan sering kali dinilai paling lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi pedesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan pertama kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan kedua kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, di mana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi pedesaan. Jika desa wirausaha menjadi suatu gerakan massif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi pedesaan.

Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi perubahan, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa

pun dapat berarti mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang dapat digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa.

Melihat Hasil Wawancara menyatakan Pengembangan kewirausahaan mengarahkan untuk meningkatkan perekonomian pada kegiatan kelompok atau pun individu. Adapun upayanya yaitu keberadaan BUMDes yang menjadi salah satu pertimbangan untuk membuka inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan warga desa dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Namun, masih banyak potensi alam di pedesaan di kabupaten Pandeglang yang belum sepenuhnya terrealisasikan dengan baik dikarenakan tidak adanya modal, kreatifitas, dan jiwa kewirausahaan Adapun langkah PMD dan Kabupaten Pandeglang yaitu Meningkatkan efisiensi kerja bagi Dinas dan Kecamatan kabupaten Pandeglang

Adanya Prasarana dan Sasaran yang dibutuhkan dalam Infrastruktur Desa

Prasarana dan Sasaran merupakan bagian yang terpenting untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa infrastruktur adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalansi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung fungsinya suatu system tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan asset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan Hasil Wawancara menyatakan Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaanya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Terutama tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan berwawasan lingkungan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa. dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang suatu Proses yang dilakukan Oleh Dinas PMD dalam menjalankan Program Inovasi Desa dengan mengikuti Program-Program yang ada di prosedur. Dan melaksanakannya sesuai dengan pedoman.

Namun di pedesaan kabupaten Pandeglang mengalami Keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia dikarenakan Tidak adanya kepercayaan Masyarakat Desa dalam pembagunan infrastruktur, seperti gotong royong dan berpartisipasi dalam pengumpulan Dana. Dan juga masih ketergantungan dengan Dana desa. Adapun langkah PMD Kabupaten Pandeglang yaitu Menumbuhkan rasa percayaan masyarakat Desa kepada Program Inovasi Desa.

Melihat dari hasil analisis yang digambarkan dalam pembahasan sebelumnya yang dapat disimpulkan terlihat dari program yang dibuat oleh Pemerintah masih belum bisa berjalan sepenuhnya oleh Dinas PMD Kabupaten Pandeglang. Dan masih ada beberapa kendala terhadap Program Inovasi Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa, Untuk mengetahui beberapa kendala tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah 2. potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terrealisasikan dengan baik 3. Keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Dinas PMD dan kecamatan Kabupaten Pandeglang untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Program Inovasi Desa No. 83 Tahun 2017 antara lain : 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya berinovasi. 2. Meningkatkan efisiensi kerja bagi Dinas dan Kecamatan. 3. Menumbuhkan rasa percayaan masyarakat Desa kepada Program Inovasi Desa.

KESIMPULAN

Melihat dari hasil analisis yang digambarkan dalam pembahasan sebelumnya yang dapat disimpulkan terlihat dari program yang dibuat oleh Pemerintah masih belum bisa berjalan sepenuhnya oleh Dinas PMD Kabupaten Pandeglang. Dan masih ada beberapa kendala terhadap Program Inovasi Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa, Untuk mengetahui beberapa kendala tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah 2. potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terrealisasikan dengan baik 3. Keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Dinas PMD dan kecamatan Kabupaten Pandeglang untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Program Inovasi Desa No. 83 Tahun 2017 antara lain : 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya berinovasi. 2. Meningkatkan efisiensi kerja bagi Dinas dan Kecamatan. 3. Menumbuhkan rasa percayaan masyarakat Desa kepada Program Inovasi Desa.

Adapun saran penelitian yaitu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan kepercayaan masyarakat melalui sosialisai terhadap pentingnya Program Inovasi Desa bagi Desa itu sendiri. Sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal, memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan terhadap Masyarakat dalam peningkatan pengetahuan tentang inovasi desa sehingga dapat memajukan desa dalam mewujudkan Kemandirian desa dan melakukan pengembangan kewirausahaan yang mengarahkan peningkatan ekonomian pada kegiatan kelompok. Serta perlunya dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Mangkunegara, A, P. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bugian, B. (2007). Metodologi penelitian kuantitatif. Jakarta: Kencana Perdana.
- Sofyan, E. (1998). Alterlatif Kebijakan Pelaksanaan Administrative. Yogyakarta: Ubim Press
- Bachtiar, E. (2002). Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Gibson. (1995). Organisasi dan manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Hisrich, R, D., & Peters, M, P. (1995). Entrepreneurship, starting, Developing and Managing a New Entreprise. DC: Tokyo Richard D. Irwin.
- Hanif, N, (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, S, P. (1994) administrasi pembangunan, Jakarta, cetakan 1: Gunung Agung
- Notoatmodjo, S,. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Richard, Richard. (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku. Jakarta.Erlangga
- Suharto D. (2016) . Membangun Kemandirian Desa.Yogyakarta: PustakaPelajar